**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Literatur Review**

 Penelitian yang membahas tentang kesetaraan gender tentunya telah di kaji oleh banyak tokoh hingga mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Maka penulis meggunakan buku, laporan penelitian, skripsi dan jurnal sebagai sumber, referensi dan informasi diantaranya sebagai berikut :

 Tulisan yang pertama yaitu skripsi yang berjudul “Kampanye He For She pada tahun 2015-2016 yang diprakarsai oleh UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia” yang disusun oleh Haifa Hafiyanti Susetyo(Haifa Hafiyanti 2017). Penulis ini memaparkan bagaimana kampanye He For She yang di landaskan oleh UN Women dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Terlebih banyaknya terjadi ketimpangan yang menyebabkan ketidakadilan gender, yang tentunya dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Ketidakadilan di Indonesia sendiri sangat beragam termasuk kepada kaum perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor tersebut diakrenakan masih adanya pemikiran partiarki yang berarti laki-laki masih berkuasa diatas perempuan, tentunya pemikiran perempuan lemah dan tidak berkompeten harus di hapuskan.

 Dalam menangani ketidakadilan tersebut UN Women melalui kampanye He For She yaitu melibatkan laki-laki mewujukan kesearaan gender sehingga menghapuskan pola pola pikir tersebut dan mendukung dan memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan. Kampanye ini sendiri merupana Gerakan solidaritas yang melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan berbasis gender sehingga dalam keterlibatan tersebut dapat merubah pola piker mereka dan memberikan dukungan serta memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan.

Tulisan kedua yaitu merupakan buku dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berjudul “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Buku ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang berfokus pada gender dikarenakan rasa peduli terhadap banyaknya peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai kebijakan melalui diskriminatif dan atau tentang gender, yang terjadi baik di luang lingkup negara nasional, pusat maupun daerah.

Buku parameter kesetaraan gender ini memberikan uraian mengenai kesetaraan gender dalam bentuk perundang-undangan sehingga tidak terbatas pada peraturan daerah saja dan hal ini perlu disusun tersendiri sekaligus melengkapi buku pedoman yang sudah diterbitkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangan kesetaraan gender ke dalam suatu rumusan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dijabarkan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol atas penguasaan terhadap sumber daya, maka diharapkan pula akan berdampak pada perlakuan dan pemenuhan hak yang berperspektif kesetaraan gender, dan bukan sebaliknya berakibat pada diskriminatif atau bias gender. Oleh karena itu ketentuan perundang-undangan akan mejadi dasar hukum dan bentuk peraturan pun lebih terimplementasikan demi terwujudnya kesetaraan gender.

Tulisan ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia” jurnal ini disusun oleh Louisa Yesami Krisnalita. Penulis ini menjelaskan tentang hak asasi manusia terhadap perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, didalam jurnal inipun dijelaskan bahwa bagaimana permasalahan hak-hak perempuan di Indonesia Hak asasi terhadap perempuan, merupakan hak yang tentunya di punyai oleh seorang perempuan, karena ia seorang manusia ataupun sebagai seorang perempuan itu sendiri. Dalam hukum hak asasi manusia tentunya dapat ditemukan dalam berbagai sistem yang mengatur tentang hak asasi manusia (Krisnalita 2018).

Pengaturan tentang atas hak asasi seorang perempuan tentunya ada dalam berbagai sistem hukum yang membahas menganai hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang merupakan yang mengkaji tentang sistem hukum hak asasi manusia yang terdapat di dalam ranah internasional maupun nasional. Perempuan merupakan suatu kelompok dalam tatanan masyarakat yang berada di dalam suatu negara, ini yaitu kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak nya. Penulis juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran dan hak dalam bidang politik dalam pemerintahan, di bidang kewarganegaraan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kesehatan, hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, hak-hak perempuan dalam ikatan / putusnya perkawinan tetapi sayangnya kekerasan masih marak terjadi terhadap kehidupan perempuan (Krisnalita 2018).

Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Literatur Review

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Buku/Skripsi/Jurnal** | **Penulis**  | **Persamaan**  | **Perbedaan**  |
| **1** | Kampanye He For She Pada Tahun 2015-2016 Yang Diprakarsai Oleh UN Women Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Indonesia | Haifa Hafiyanti Susetyo | Membahas kampanye He For She dan membahas tentang kesetaraan gender. | Membahas bagaimana menangani ketidakadilan terhadap buruh perempuandan Tindakan KDRT. |
| **2** | Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Membahas mengenai kesetaraan gender. | Membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berfokus pada gender. |
| **3** | Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia | Louisa Yesami Krisnalita | Membahas hak-hak perempuan. | Membahas isu HAM dan perempuan, lebihmenekankan isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan |

**2.2. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan kerangka dan teori-teori yang digunakan penulis untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga sebagai tolak ukur dan pembanding masalah dalam penelitian.

**2.2.1. Hubungan Internasional**

Menurut David Singer, mengatakan bahwa teori Hubungan Internasional merupakan teori yang generasi empiris atas gejala-gejala internasional memliliki kemampuan deskriptif, ekspalatif dan prediktif. Adapun generelisasi empiris itu adalah kesimpulan umum yang ditarik temuan-temuan atau fakta empiris (konkret) dan rumusan bersifat logis(J. David Singer 1961). Sementara itu, Kaplan dan George Modelski mengarti kan teori HI sebagai seperangkat norma atau nilai yang menunjukkan bagaimana aktor-aktor politik harus bertindak (behave). Pendapat ini jelas dipengaruhi oleh perspektif dalam studi HI yang melihat aktor-aktor hubungan. Dalam bentuk yang lebih sederhana, Jonathan Cristol mengatakan bahwa teori HI adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan perilaku negara di masa lalu dan memprediksikan perilaku di masa depan (cristel jonathan 2016).

 HI adalah sebuah pandangan yang mencoba untuk menyampaikan sebuah kerangka konseptual dimana hubungan internasional dapat diteliti. Teori HI membantu kita menjelaskan dunia hubungan internasional. Teori HI berisi sebuah kerangka kerja konseptual untuk memfasilitasi pemahaman dan penjelasan tentang peristiwa dan fenomena dalam politik dunia, serta untuk menganalisis dan menginformasikan keterkaitan kebijakan dan praktik hubungan internasional. Dapat juga dikatakan, teori HI merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan bagaimana sistem internasional bekerja.

**2.2.2. Kesetaraan Gender**

Interpretasi gender adalah konstruksi sosial berdasarkan perbedaan gender, yang tercermin dalam konsep tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap, dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya kepada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik dan kehidupan pribadi, menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.[[1]](#footnote-1). Gender ditampilkan baik untuk pria maupun wanita, bukan hanya untuk wanita. Orang-orang menganggap ini sebagai budaya karena perbedaan mendalam dan kesalahpahaman yang ada di masyarakat mengenai konstruksi sosial.

Menurut definisi gender H. T. Wilson dalam bukunya Sex and Gender, laki-laki dan perempuan berkontribusi secara berbeda terhadap budaya dan masyarakat, begitulah cara mereka diidentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan. Dia berpendapat bahwa karena budaya lokal berdampak pada gender, pria dan wanita berperilaku berbeda dari wanita dalam hal kebiasaan, norma, dan pandangan yang berasal dari budaya masyarakat. Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Ratna megawangi beragumen bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminim yang dikontruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi[[2]](#footnote-2).Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultular[[3]](#footnote-3).

**2.2.3. Gerakan Feminisme**

Feminisme berasal dari kata Latin untuk wanita, femina. Ungkapan ini pertama kali muncul pada tahun 1890-an untuk menggambarkan filosofi kesetaraan gender dan perjuangan hak-hak perempuan (Asmaeny Azis 2007). Menurut pengetahuan baru yang muncul dalam menyikapi persoalan-persoalan aktual perempuan tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan, jika dilihat dari perspektif gender, feminisme Islam pada umumnya merupakan alat analisis sekaligus gerakan historis dan kontekstual. Banyak orang saat ini mendefinisikannya sebagai pembedaan yang berpihak pada hak laki-laki atas hak perempuan berdasarkan kesetaraan gender. Feminisme adalah ideologi yang mengakui posisi perempuan yang diremehkan dalam masyarakat dan berusaha untuk mereformasi atau memperbaikinya (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner 1997).

Sedangkan menurut Geofe (dalam Sugihastuti dan Suharto, 2005:61) Memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan adalah bagian dari gerakan terorganisir yang dikenal sebagai feminisme. Perempuan bebas mendefinisikan diri mereka sebagai laki-laki selama ini jika mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki..

 Feminime ini menjunjung perempuan secara ras, gender, kelas dan seksual. Teori dalam feminisme menjunjung nilai-nilai penting dalam perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami oleh mereka itu sendiri. Feminism merupakan pengungkapan realita kehidupan. Menurut William Outwaite, Feminisme digambarkan sebagai dedikasi untuk memajukan status perempuan dalam masyarakat bersama-sama dengan advokasi atau dukungan untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan mengalami keadaan yang tidak seimbang, baik berupa patriarki (dominasi laki-laki), ketimpangan gender, maupun implikasi sosial dari ketimpangan gender.(William Outwaite 2008).

**2.2.4. Kampanye**

Secara umum, tujuan kampanye adalah untuk menginformasikan kepada publik agar mereka lebih menerima isu-isu yang diangkat. Menurut Antar Venus, itu melayani tujuan berikut selama kegiatan kampanye:

* Dalam upaya mengembangkan kampanye untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan pengetahuan dan opini publik tentang masalah tertentu; sebagai metode informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat; dan
* Pertumbuhan bisnis melalui mempengaruhi khalayak untuk membeli barang yang dipasarkan
* Untuk mempromosikan persepsi yang baik dari peserta kampanye

Menurut Kotler & Roberto (Philip Kotler, Eduardo L. Roberto, 1989) menegaskan bahwa kampanye sosial dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat umum dan individu tertentu. Leslie B. Snyder, mendefinisikan kampanye komunikasi sebagai tindakan terencana yang diarahkan pada audiens tertentu, yang dilakukan selama periode waktu yang telah ditentukan, dan dengan serangkaian tujuan tertentu. Menurut beberapa ahli komunikasi, konsep Rogers dan Storey adalah yang paling banyak digunakan dan diakui oleh para ilmuwan komunikasi adalah kasus untuk dua faktor.. Alasan pertama adalah bahwa definisi tersebut secara khusus menetapkan bahwa kampanye adalah jenis tindakan komunikasi, dan yang kedua adalah bahwa istilah tersebut cukup luas untuk mencakup spektrum penuh dari praktik kampanye yang diamati di dunia nyata. Setiap kegiatan kampanye komunikasi setidaknya memiliki empat komponen: sejumlah besar khalayak sasaran yang terkonsentrasi dalam waktu singkat, urutan tindakan komunikasi yang direncanakan, dan tindakan kampanye yang dimaksudkan untuk menghasilkan efek atau dampak tertentu. Kampanye juga memiliki kualitas atau kualitas tambahan, seperti sumber yang jelas, siapa pencipta, penyiar, dan orang yang bertanggung jawab atas suatu produk kampanye (pembuat kampanye), sehingga setiap orang yang mendengar pesan kampanye dapat mengenalinya dan bahkan menilainya.

**2.2.5. Kampanye Global**

Global merupakan istilah umum yang merujuk kepada beberapa pengertian sebagai berikut antara lain : secara umum keseluruhan secara bulat ( hitungan ,kesepakatan ,keputusan) secara garis besar, bersangkut paut mengenai atau meliputi seluruh dunia. Sedangkan kampanye itu sendiri merupakan Menurut beberapa ahli komunikasi, konsep Rogers dan Storey adalah yang paling banyak digunakan dan diakui oleh para ilmuwan komunikasi adalah kasus untuk dua faktor.. Alasan pertama adalah bahwa definisi tersebut secara khusus menetapkan bahwa kampanye adalah jenis tindakan komunikasi, dan yang kedua adalah bahwa istilah tersebut cukup luas untuk mencakup spektrum penuh dari praktik kampanye yang diamati di dunia nyata.

Dalam pembahasan ini kampanye global yaitu kampanye yang dilaksanakan secara umum serta kampanye ini bersifat keseluruhan dan meliputi seluruh dunia dapat bergabung dalam kampenye ini dan Kampanye ini merupakan usaha untuk meminta bantuan kepada masyarakat agar maksud dapat tersampaikan kampanye ini merupakan bentuk tindakan sosial ini juga mengkomunikasikan secara terencana agar masyarakat akan mendukung seseorang atau suatu kelompok yang sudah terorganisir dalam kurun waktu tertentu

**2.2.6. Sosialisasi**

**S**osialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai- nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya.

 Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut.

Pengertian sosialisasi. Soekanto dalam Lindriati dkk (2017) berpendapat sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Menurut Agustin (2014), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Menurut Gunawan (2012:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Tujuan sosialisasi. Menurut Agustin (2014), tujuan sosialisasi antara lain: 1) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. 2) Menambah kemampuan berkomunikas secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis,dan bercerita. 3) Membantu pengendalianfungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. 4) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

**2.2.7. Partisipasi Perempuan**

Partisipasi biasanya dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan upaya yang menentukan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Adjid (1985) mendefinisikan partisipasi sebagai kapasitas masyarakat untuk menanggapi kondisi lingkungan secara sukses, tertib (integrasi), memungkinkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan logika yang terkandung dalam kondisi lingkungan.

Pengertian partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977), adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan, pemanfaatan hasil, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Sayogyo (1998) menawarkan kesempatan untuk terlibat dalam memutuskan kebijakan pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan sebagai definisi lain dari partisipasi. Sajogyo (2003) menawarkan definisi lain dari partisipasi sebagai suatu proses di mana sejumlah mitra berbagi wewenang dan pengaruh atas proyek-proyek pembangunan, termasuk pilihan sumber daya mana yang akan dialokasikan. Ia menegaskan bahwa inilah yang dimaksud dengan partisipasi penuh, yakni membangun keterlibatan mencapai puncaknya dalam inisiatif pemberdayaan. Dalam literatur lain, FAO (1989) dalam Mikkelsen (2001) menerangkan bahwa

* Partisipasi “mempekakan” (membuat peka) lingkungan agar lebih terbuka dan tanggap terhadap proyek-proyek pembangunan.
* Partisipasi adalah proses aktif, artinya individu atau kelompok yang ambil bagian menggunakan kebebasannya untuk berinisiatif.
* Untuk mengumpulkan pengetahuan tentang konteks lokal dan dampak sosial, partisipasi adalah peningkatan komunikasi antara masyarakat lokal dan karyawan yang melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.
* Partisipasi masyarakat adalah ketika anggota secara sukarela mengambil bagian dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
* Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam peningkatan anggotanya, kehidupan mereka, dan lingkungannya.

Cleaver mengatakan bahwa dalam argumen efisiensi, partisipasi adalah proses untuk membantu orang menjadi lebih mampu, yang mengarah pada peningkatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam argumentasi demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi merupakan proses untuk membantu masyarakat menjadi lebih berdaya. ini adalah hidup (Cleaver, 2002 dalam Cooke & Kothari, 2002:37)

**2.2.8. Kampanye He For She**

PBB membuat badan-badan khusus untuk melindungi kesejahteraan, melidungi perempuan dan menangani kasus gender, seperti UN Women. UN Women adalah Peserikatan Bangsa-Bangsa di bidang kesejahteraan gender dan pemberdayakan perempuan dan anak-anak. UN Women mendukung negara anggota PBB untuk mencapai standar global dalam kesetaraan gender dengan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan standar untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia.

UN Women membuat sebuah badan dibawah naungan UN Women yaitu UN Women Goodwill untuk mempermudah mencapai tujuan. Pada 20 September 2014, UN Women Goodwill mendirikan sebuah kampanye bernama HeForShe. HeForShe adalah sebuah platform untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan gender dengan mengunakan pendekatan sistematik yang dijadikan program untuk menargetkan laki-laki untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menjadi agen perubahan dalam ketidakadilan. Pada 2016, Indonesia menggelar pameran komik dan kartun bertajuk planet 50-50 di Jakarta dengan bersamaan secara resmi menyuarakan keterlibatannya di kampanye HeForShe. Adanya dampak kampanye ini sangat positif untuk membuka pikiran dan mengubah pola pikir di Indonesia.

Sekjen PBB resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Setelah itu, pada Januari 2006, Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon menyampaikan laporan berjudul ‘Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan’ atau ‘*Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women’* Pembentukan entitas baru, UN Women, akan membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam tugas mereka untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon memutuskan dalam laporannya. Badan baru UN Women harus berusaha mempertajam fokus dan dampaknya. dari kerja sistem PBB tentang kesetaraan gender (UN Woman 2019).

**2.2.9.Partisipasi Perempuan Indonesia**

Pemerintah Indonesia berfokus pada empat sektor utama, yaitu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pencegahan kekerasan, sebagai pengakuan atas peran penting yang dimainkan perempuan dalam pembangunan. Topik pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender, juga digarap dalam langkah-langkah strategis.

Awalnya di bidang pendidikan. Melalui Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar, pemerintah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan mengamanatkan wajib belajar 12 tahun. Kedua, Indonesia memprioritaskan peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan remaja, meningkatkan upaya perbaikan gizi, termasuk kesehatan reproduksi ke dalam sistem pendidikan, dan mendorong literasi keluarga.serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.

Ketiga, pemerintah memprioritaskan peningkatan kesempatan kerja, mempromosikan fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan kekuatan pasar, meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan memberikan pelatihan bagi perempuan, dan memperkuat penerapan undang-undang ketenagakerjaan yang mendukung kesetaraan gender.

Keempat, akhirnya terkait dengan pengurangan kekerasan. Indonesia berupaya untuk mendefinisikan kekerasan dan penyelundupan perempuan dengan lebih baik, melindungi korban kekerasan terhadap perempuan secara hukum, dan meningkatkan efisiensi layanan bagi penyintas perempuan dan anak.

Sektor kreatif adalah solusi untuk inisiatif yang bertujuan memberdayakan perempuan di tempat kerja. Di sektor industri kreatif, perempuan berhasil menyerap sebagian besar pekerjaan. Perempuan terus mendominasi bisnis kreatif dari 2011 hingga 2016, menurut Laporan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif dari BPS dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

53,86% pekerja di industri ini adalah perempuan. Jika dibandingkan dengan perincian gender bisnis secara keseluruhan, di mana pekerja perempuan hanya sekitar 37,16% dan pekerja laki-laki mencapai 62,84%, angka ini sangat mengejutkan. 9,4 juta perempuan dipekerjakan dalam ekonomi kreatif pada tahun 2016.

Melalui bisnis perfilman khususnya, sektor ekonomi kreatif memberikan peluang bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghasilkan sutradara, penulis skenario, produser, dan pakar perempuan dalam produksi audio dan video.

Terlepas dari kenyataan bahwa perempuan harus diizinkan untuk bekerja di semua profesi, mereka sejauh ini mampu menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses pertumbuhan. Agar kontribusi perempuan menjadi seefektif mungkin di masa depan, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya hanya perlu memperluas peluang mereka..[[4]](#footnote-4)

**2.2.10. Sosialisasi Kampanye He For She**

UN Women memiliki peran penting dalam tugasnya sebagai badan khusus dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam mendorong dalam segala aspek bidang ekonomi, sosial dan politik. Peran utama The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women adalah:

1. Mendukung badan antar pemerintah, seperti komisi status wanita (Commision On The Status Of Women) dalam merumusan kebijakan, standar dan norma global terhadap kesetaraan gender.
2. Membantu negara-negara anggota untuk menerapkan standar ini dan siap memberikan dukungan penuh terhadap teknis dan finansial kepada negaranegara anggota untuk menjalin kemnitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3. Adanya koordinasi terhadap tujuan dari PBB tentang kesetaraan gender dengan meminta pertanggungjawaban atas komitmennya sendiri pada kesetaraan gender dengan melalui pemantauan dan kemajuan terhadap seluruh sistem PBB.

Tujuan dan fokus utama yang ingin dicapai dari kampanye HeForShe ini adalah mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030. HeForshe meluncurkan IMPACT 10X10X10 untuk mempercepat tujuan ini dan mencapai target. IMPACT 10X10X10 adalah program percontohan yang meminta kepala negara, institusi akademik, dan bisnis untuk memberikan contoh di wilayah mereka dan membawa perubahan struktural dan budaya yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan.[[5]](#footnote-5)

**2.3. Hipotesis Penelitian**

Dengan latar belakang dan penjelasan yang sudah di jelaskan maka menimbulkan hipotesis sebagai berikut :

**“Dengan diimplementasikannya 5 program kampanye He for She yaitu, Goes to Campus, He For She Run, SIMFONI, Kampanye di Seluma dan pendaulantan pemimpin daerah menjadi duta dalam kampanye tersebut, maka itu meningkatkan kesadaran laki-laki dalam pentingnya kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan meningkat dan kesetaran gender di Indonesia dapat terwujud” .**

**2.4. Verivikasi Variabel Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam hipotesis (teoritik) | Indikator(empirik) | Veritivikasi (analisis) |
| Variabel bebas :Implementasi program kampanye He for She sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia dapat terwujud | 1.pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan serta megakhiri kekerasan terhadap perempuan 2. .keterlibatan pemuda pada kesetaraan gender | 1. Perusahaan swsta yang bekerjasama mendukung pemberdayaan perempuan yaitu Danone, di Indonesia mengimplementasikan Kampanye He For She dilingkungan kerjanya dengan memberikan program mentoring karir kepada pekerja perempuan dalam program EVE. Dengan adanya seminar EVE ini, perempuan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi rintangan dalam karier. (Sumber : Eve, Le Blog “Veranita Yosephine : « Join the HeForShe cause to create an equal and meaningful world for men and women!” diakes di <https://www.eveprogramme.com/24634/veranitaheforshe/> Pada tanggal 3 Januari 2021) 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan Youth Studies Center (YouSure) Fisipol UGM menyelenggarakan acara #HeForShe Goes to Campus di Ruang Seminar Timur Fisipol Dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia maka kampanye He For She di wilayah di Indonesia kampanye ini menyasar target generasi muda maka acaranya pun dibuat sedemikian rupa agar menarik minat pemuda. (Sumber : <https://fisipol.ugm.ac.id/mewujudkan-kesetaraan-gender-lewat-gerakan-heforshe-goes-to-campus/>)   |
| Variabel Terikat : Kesetaraan gender di Indonesia dapat terujud | 1. Meningkatnya kesetaraan gender di Indonesia membuat perempuan lebih bebas dan aktif serta membantu memulihkan ekonomi di Indonesia | 1. Melalui Kampanye He For She Dalam Mencipatkan Rasa Aman Bagi Perempuan. Salah satunya bekerjasama dengan lembaga swasta untuk pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja dilingkungan kerjanya dengan memberikan program mentoring karir kepada pekerja perempuan dalam program EVE. Dengan adanya seminar EVE ini, perempuan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi rintangan dalam karier dan pemberdayaan perempuan akan terwujud. Dampak dari kampanye *He She for* bagi Indonesia sendiri memberikan peran dan kontribusi perempuan dalam perekonomian sehingga semakin signifikan sebagai bentuk pemulihan ekonomi (sumber: [Ini Kontribusi Perempuan dalam Ekonomi Nasional (kemenkeu.go.id)](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-kontribusi-perempuan-dalam-ekonomi-nasional/)) |

**2.5. Skema Kerangka Konseptual**

Bagan 2.1. Skema toritik penelitian

UN WOMEN

Peningkatan pemberdayaan perempuan

Indonesia

Kampanye

He For She

**BAB III**

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik, (Jakarta: Kencana, 2013), 271. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan [↑](#footnote-ref-4)
5. 0 UN Women“In the words of Johanna Tantria T. Wardham: “Gender inequality starts from the household” diakses di https:/ /www.unwomen.org/en/news/stories/2017/11 /in-the-wordsof-johanna-tantria-t-wardham, [↑](#footnote-ref-5)